

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Artise H.S. Salendu<sup>1)</sup>, Ingriet D.R. Lumenta<sup>1)</sup>, Hendrik Oberd Gijoh<sup>1)</sup>, Femi H. Elly<sup>1)</sup> dan  
Derek Polakitan<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Indonesia 95115

<sup>2)</sup>BPTP Kalasey, Sulawesi Utara, Indonesia

Email korespondensi : artisesalendu@yahoo.com

## Abstrak

Peternakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu subsektor penunjang sektor pertanian. Pembangunan peternakan dalam hal ini selalu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah ini. Peternakan yang menjadi prioritas adalah pengembangan sapi potong. Permasalahannya sejauhmana kebijakan yang dicanangkan pemerintah dalam menunjang pembangunan peternakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam menunjang pembangunan peternakan. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan metode survey. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna yang melakukan pengembangan sapi potong. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Jumlah responden berjumlah 60 petani untuk Kecamatan Sangkub, 28 petani untuk Kecamatan Bintauna dan 41 petani untuk Kecamatan Bolangitang Timur. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan peternakan sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Permasalahan tersebut antara lain tingginya pemotongan produktif, skala usaha kecil, hanya sebagian kecil petani yang menjadikan usaha ternak sapi sebagai usaha pokok, terbatasnya modal petani, kurangnya investor bidang peternakan sapi lemahnya kelembagaan petani dan penyuluh, kurang tersedianya sumberdaya pakan. Kondisi ini yang menyebabkan pertumbuhan ternak sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agak lambat dan kurang bersaing dengan daerah lain di Sulawesi Utara. Kesimpulan bahwa kebijakan yang perlu dicanangkan pemerintah harus bersifat agresif melalui pembangunan peternakan sapi tidak hanya pada sisi budidaya tetapi penyedia input, serta kelembagaan penunjang. Pendampingan masih dibutuhkan dalam menunjang pembangunan peternakan sapi potong.

*Kata kunci : Sapi potong, kebijakan, pembangunan*

## 1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia adalah bagian integral pembangunan, telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia masa depan sebagai suatu paradigma yang diarahkan pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan dimaksud adalah yang berbudaya industri dan berdaya saing global dengan pendekatan ekosistem. Pemerintah mendorong pembangunan pertanian melalui berbagai kebijakan dengan tujuannya (Kementerian Pertanian, 2016) adalah (i) meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri. (ii) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan; (iii) meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan (iv) mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan.

Peternakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu subsektor penunjang sektor pertanian. Pembangunan peternakan dalam hal ini selalu mendapat perhatian

serius oleh pemerintah daerah ini. Peternakan yang menjadi prioritas adalah pengembangan sapi potong. Permasalahannya sejauhmana kebijakan yang dicanangkan pemerintah dalam menunjang pembangunan peternakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam menunjang pembangunan peternakan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan metode survey. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan petani peternak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna yang melakukan pengembangan sapi potong. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Jumlah responden berjumlah 60 petani untuk Kecamatan Sangkub, 28 petani untuk Kecamatan Bintauna dan 41 petani untuk Kecamatan Bolangitang Timur. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sapi potong di wilayah penelitian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki prospek dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, populasi ternak sapi, potensi sumberdaya dan produktivitas tanaman pangan. Secara keseluruhan luas wilayah penelitian adalah 1.856,86 Km<sup>2</sup>, secara administratif kabupaten ini dibagi menjadi 107 desa/kelurahan dan 6 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 71.570 jiwa pada Tahun 2013. Batas-batas wilayah sebagai berikut : Utara dengan Laut Sulawesi, Selatan dengan Propinsi Gorontalo, Barat dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu kabupaten yang memprioritaskan peternakan khususnya peternakan sapi dalam menunjang pembangunan daerah. Data perkembangan ternak sapi potong di Bolaang Mongondow Utara terlihat pada Tabel 1.

Data pada Tabel 1 menunjukkan ternak sapi potong pada tahun 2013 mengalami penurunan kemudian meningkat sejak tahun 2014 ke tahun 2015. Penurunan populasi ternak sapi potong disebabkan terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi antara lain tingginya pemotongan ternak sapi produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan pembibitan ternak sapi potong. Kebijakan introduksi bakalan belum dilakukan baik oleh petani itu sendiri maupun oleh pemerintah.

Tabel 1. Populasi Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Tahun	Populasi (Ekor)
1	2011	12.490
2	2012	13.072
3	2013	12.847
4	2014	13.738
5	2015	14.690

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Bolaang Mongondow Utara, 2016

Permasalahan yang lain adalah pemeliharaan ternak sapi oleh petani umumnya merupakan usaha sambilan dengan sistem pemeliharaan secara tradisional. Ciri-ciri tradisional diantaranya skala usaha kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilikan ternak sapi potong oleh responden di Kecamatan Sangkub sebanyak 230 ekor dengan rata-rata pemilikan 2-17 ekor. Jumlah responden di Kecamatan Sangkub sebanyak 60 petani dan 4 orang petani diantaranya memiliki 10-17 ekor ternak sapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil petani yang menjadikan usaha ternak sapi sebagai usaha pokok. Hasil penelitian di Kecamatan Bintauna menunjukkan bahwa jumlah responden 28 petani memiliki ternak sapi sebanyak 89 ekor dengan rata-rata pemilikan 2-7 ekor. Sedangkan pemilikan ternak sapi oleh 41 petani di Kecamatan Bolangitang Timur sebanyak 141 ekor dengan rata-rata pemilikan 2-5 ekor. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani kurang kompetitif dalam mengembangkan usaha ternak sapi mereka. Kebijakan introduksi sapi induk belum berhasil dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ternak sapi belum maksimal, disisi lain petani belum siap dengan adanya kebijakan bantuan ternak sapi potong. Apabila pemerintah kurang memperhatikan kondisi ini maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan kalah bersaing dengan daerah lain di Sulawesi Utara.

Terbatasnya modal petani juga merupakan kendala yang menyebabkan perkembangan ternak sapi lambat. Keadaan ini yang menyebabkan kurangnya motivasi petani dalam peningkatan usaha ternaknya. Pemerintah harus berupaya mencanangkan kebijakan peningkatan investasi pada bidang peternakan sapi potong. Investor sangat dibutuhkan dalam pengembangan ternak sapi potong di Bolaang Mongondow Utara.

Kelembagaan berkaitan dengan pembangunan peternakan sapi potong masih lemah. Kelembagaan petani terutama di tingkat kelompok tani ternak sapi masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar petani menjalankan usahanya secara individu, disisi lain kelompok tani ternak sapi potong belum maksimal dalam kegiatan kelompoknya. Kondisi ini menyebabkan kordinasi oleh pemerintah agak lambat karena dilakukan secara individu. Kebijakan yang perlu dilakukan penguatan kelembagaan petani dengan cara mengaktifkan anggota kelompok melalui pemberdayaan. Kelembagaan penyuluh juga masih sangat lemah. Kurangnya penyuluh bidang

peternakan menyebabkan masalah yang dihadapi oleh petani tidak langsung ada pemecahannya. Pemerintah perlu merekrut penyuluh peternakan yang ditempatkan di daerah pengembangan peternakan seperti di tiga kecamatan sampel.

Ketersediaan sumberdaya pakan sapi potong masih kurang sehingga produktivitas ternak sapi rendah. Pakan adalah tantangan paling besar dalam proses produksi ternak di Negara-negara berkembang (Sirait *et al.* 2007). Permasalahan pakan sangat urgen dalam pembangunan peternakan, dan hal menjadi kendala bagi petani (Muslim dan Nurasa, 2008; Prawiradiputra, 2011; Alfian *et al.* 2012; Salendu *et al.* 2012; Susanti *et al.* 2013). Introduksi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ketersediaan pakan sapi. Pemanfaatan lahan tidur dapat dioptimalkan dan menurut Salendu dan Elly (2011) lahan di bawah pohon kelapa memiliki potensi untuk pengembangan peternakan sapi potong. Lahan kosong perkebunan dalam hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal (Rusdiana dan Adawiyah, 2013). Informasi yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas bahan pakan menurut Saragi (2014) sangat dibutuhkan untuk menunjang program akselerasi pembangunan peternakan sapi.

Permasalahan-permasalahan tersebut yang menyebabkan perkembangan populasi ternak sapi potong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung lambat. Kebijakan yang dicanangkan harus bersifat agresif dan pendampingan oleh pemerintah lebih intensif. Berhasilnya pembangunan peternakan sapi potong harus ditunjang dengan peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya petani. Menurut Bamualim *et al.* (2008) bahwa dukungan dan pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan agar peningkatan populasi, produktivitas dan kelanjutan usaha dapat terjamin. Asupan inovasi teknologi sangat dibutuhkan dan hal ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan usaha ternak sapi potong (Rahmansyah *et al.* 2013). Kebijakan pembangunan peternakan sapi potong yang dicanangkan oleh pemerintah harus menggunakan metode yang tepat agar program tersebut berhasil dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Hal ini seperti yang dinyatakan Isna (2009).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang perlu dicanangkan pemerintah harus bersifat agresif melalui pembangunan peternakan sapi potong tidak hanya pada sisi budidaya tetapi penyedia input, serta kelembagaan penunjang. Saran sebagai rekomendasi adalah pendampingan masih dibutuhkan dalam menunjang pembangunan peternakan sapi potong.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada DRPM Kemenristekdikti yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh dana skim Penelitian Strategis Nasional.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Y., F.I. Hermansyah., E. Handayanto., Lutojo dan W.P.S. Suprayogi. 2012. Analisis Daya Tampung Ternak Ruminansia pada Musim Kemarau di Daerah Pertanian Lahan Kering Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul. *Tropical Animal Husbandry* 1 (1) : 33-42.
- Bamualim, A., A. Thalib., Y.N. Anggraeni dan Mariyono. 2008. Teknologi Peternakan Sapi Potong Berwawasan Lingkungan. *Wartazoa*, Vol. 18. No. 3 Tahun 2008, p:149-156.
- Isna, A. 2009. Implementasi Kebijakan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga). *Wacana* Vol. 12. No. 3 Juli 2009, p:501-518.
- Kementerian Pertanian. 2016. Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian (Refocusing Program). Rapat Kerja BBLitbang Sumberdaya Lahan Pertanian. April 2016. Biro Perencanaan-Setjen, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Muslim, C dan T. Nurasa. 2008. Kebijakan pengembangan ternak sapi potong di Wilayah Sentra Produksi Berbasis Tanaman Pangan di Indonesia. Pusat Analisis Sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang, departemen Pertanian.
- Prawiradiputra, B. 2011. Pasang Surut Penelitian dan Pengembangan hijauan Pakan Ternak di Indonesia. Balai Penelitian Ternak, Bogor.
- Rahmansyah, M., A. Sugiharto., A. Kantidan I.M. Suidiana. 2013. Kesiagaan Pakan pada Ternak Sapi Skala Kecil sebagai Strategi Adopsi Terhadap Perubahan Iklim melalui Pemanfaatan Biodiversitas Flora Lokal. *Buletin Peternakan* 37 (2) 95-106.
- Rusdiana, S dan C.R. Adawiyah. 2013. Analisis Ekonomi dan Prospek Usaha Tanaman dan Ternak Sapi di Lahan Perkebunan Kelapa. *SEPA10* (1) :118-131.
- Salendu, A.H.S., Maryunani., Soemarsono and B. Polii. 2012. Integration of Cattle-Coconut in South Minahasa Regency. *Proceeding : The 2<sup>nd</sup> International Seminar on Animal Industry 2012 (ISAI) Faculty of Animal Science Bogor Agricultural University.*
- Salendu, A.H.S dan F.H. Elly. 2011. Model Integrasi Kelapa dan ternak sapi Sebagai Suatu Pendekatan *Ecofarming* di Sulawesi Utara. *Prosiding Seminar Nasional. Strategi Pengembangan Peternakan Masa Depan Melalui Pendekatan Eco-Farming.* Fakultas Peternakan. UNSRAT, Manado, Sulawesi Utara.
- Saragi, M.P. 2014. Potensi dan Kualitas Limbah Pertanian sebagai Pakan di Kabupaten Bandung dan Bogor untuk Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Perah. Tesis. Sekolah Pascasarjana, IPB Bogor.
- Sirait, J., A. Tarigan., K. Simanihuruk dan Junjungan. 2007. Produksi dan Nilai Nutrisi Enam Spesies Hijauan pada tiga Taraf Naungan di Dataran Tinggi Beriklim Kering. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.* p:706-713.
- Susanti, A.E., A. Prabowo dan J. Karman. 2013. Identifikasi dan Pemecahan Masalah Penyediaan Pakan Sapi Dalam Mendukung Usaha Peternakan Rakyat di Sumatera Selatan. *Prosiding.Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan. Inovasi Agribisnis Peternakan Untuk Ketahanan Pangan.* Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung. p:127-132.